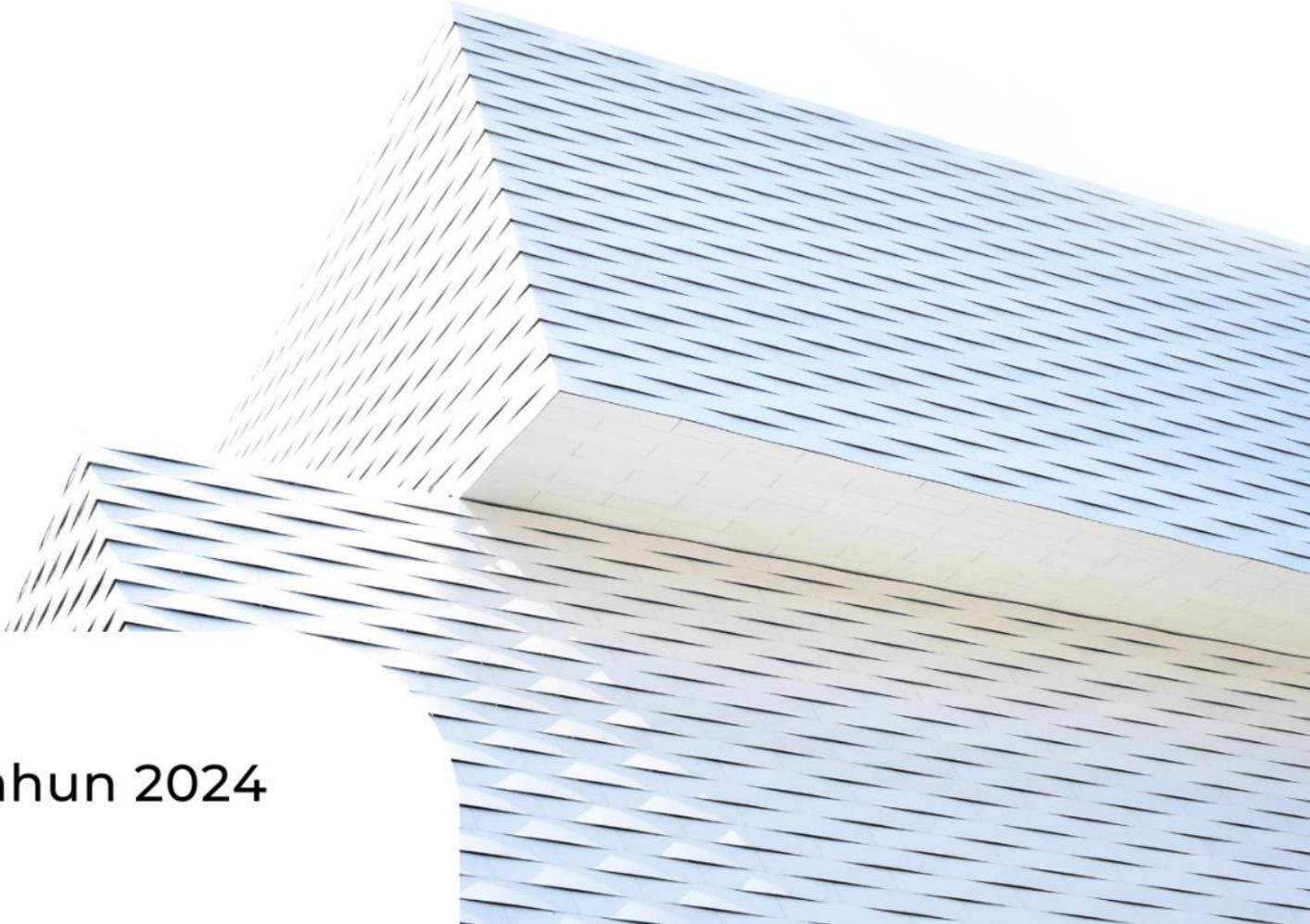




RENCANA KERJA

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bandung

Tahun 2024

An abstract graphic in the bottom right corner features a stack of overlapping, light blue and white geometric shapes, resembling a modern architectural structure or a stylized staircase. The shapes are composed of many thin, parallel lines, creating a sense of depth and movement.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2024. Penyusunan Renja ini berpedoman pada RKPD Kota Bandung Tahun 2022 serta Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026.

Melalui penyusunan Renja ini, diharapkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai target walaupun terdapat beberapa penyesuaian sebagai akibat dari adanya perubahan regulasi. Kami menyadari bahwa Renja ini tentu masih banyak kekurangan dalam penyusunannya, oleh karena itu sumbang saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renja yang akan datang.

Semoga Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 ini dengan segala keterbatasannya dapat bermanfaat khususnya untuk dijadikan pedoman di dalam pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan internal dan umumnya bagi Pemerintah Kota Bandung di dalam melaksanakan pembangunan terutama dalam hal pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan yang lebih baik.

Bandung, Februari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



H. TATANG MUHTAR, S.Sos. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680602 198903 1 004



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap komponen organisasi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi diperlukan langkah-langkah strategis kearah pelaksanaan dan pengembangan dari sistem kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bandung 2005-2025, Rencana Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung serta Visi dan Misi Kota Bandung), dalam rangka perwujudan "*public good and service*" atau "*good governance*" maupun pelayanan prima (*service excellence*).

Untuk mendapatkan kinerja Pemerintah Daerah yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang optimal diperlukan adanya program kegiatan yang visible, transparan dan legitimate sehingga akan tercipta suatu penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti fengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 (satu) tahun.



Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung sebagai salah satu Perangkat Daerah, memiliki tanggung jawab membantu Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023. Penjabaran visi dan misi tersebut disusun dalam dokumen Renstra Disdukcapil kota Bandung sebagai salah satu Perangkat Daerah yang memiliki tanggung jawab membantu Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Dearah yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023. Penjabaran visi dan misi tersebut disusun dalam dokumen Renstra Disdukcapil kota Bandung Tahun 2018-2023 yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan Disdukcapil untuk mencapai misi dan indikator



kinerja utama Kepala Daerah, serta untuk menangani isu strategis pelayanan Disdukcapil Kota Bandung.

Penyusunan Renja Disdukcapil berdasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Disdukcapil Kota Bandung disusun



berdasarkan RKPD Kota Bandung, Renstra Disdukcapil Kota Bandung.

Selanjutnya Renja Disdukcapil kota Bandung digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Disdukcapil Kota Bandung Tahun 2021 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Kota Bandung Tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Vealuasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590).
 12. Peraturan Daerah kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kewenangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3).

15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 610 Tahun 2017 Tentang Prosedur dan Mekanisme Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 16).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 disusun dengan maksud:

1. Menjabarkan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2023
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembangunan daerah
3. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam jangka 1 tahun
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.3.1. Maksud
 - 1.3.2. Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi



2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih, Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018–2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 – 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Secara normatif RenSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 berdasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/629 – Disdukcapil.



Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian sasaran sangat bergantung pada proses implementasi kegiatan/program.

Adapun uraian Misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATU -AN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tertib administrasi kependudukan		Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	95	95,25	95,50	96	96,5
	Meningkatnya kualitas pelayanan Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,9	83	83,2	83,4	83,5
		Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	95	95,25	95,50	96	96,5
		Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	50	60	65	70	75



RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil s/d Tahun 2022 Kota Bandung

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d tahun berjalan	
				Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Tahun	90 Orang/Tahun	90 Orang/Tahun	90 Orang/Tahun	100%	90 Orang/Tahun	90 Orang/Tahun	100%
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%



RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%



RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	100%



RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	40 Unit	40 Unit	40 Unit	100%	40 Unit	40 Unit	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK									
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Tepat Waktu	100%							
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan Kegiatan penduduk non permanen dan penduduk rentan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pencetakan KTP-EL dan Kartu Keluarga Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG

Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Pindah Keluar Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENCATATAN SIPIL									
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Tepat Waktu	100%							
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kematian Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Tepat Waktu	100%							
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN									
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Laporan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Laporan data yang tervalidasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Perencanaan dan Laporan Penyelenggaraan Adminduk	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan	Jumlah Laporan Fasilitasi Inovasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%



RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang Terimplementasi	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara:

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja dari 1 (satu) misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATU-AN	TAR-GET	REALI-SASI	CAPAI-AN (%)	RENSTRA (2023)	
						TARG-ET	CAPAI-AN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,5	91,02	106,46	83,5	109,01
2.	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	96	97,23	101,28	96,5	100,76
3.	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	70	94,81	135,44	75	126,41

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- a. Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tahun 2021 cukup baik, capaian per 31 Desember 2021 melebihi target.
- b. Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PD, adalah



- kurangnya sarana prasarana, profesionalitas aparat pelaksana dan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sebagai penjabaran dari visi misi Kota Bandung akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi nasional yaitu “Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil“
- d. Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain:
1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 2. Belum tersedianya gedung kantor yang *representative*, khususnya untuk pengelolaan kearsipan administrasi kependudukan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa.
- e. peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :
1. Komitmen Kepala Daerah yang dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan bertanggung jawab sukses progam KTP Elektronik yang ditanda tangani Walikota dan Ketua DPRD.



2. Adanya dukungan perangkat keras dan lunak dari Pemerintah Pusat untuk program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online.
- f. Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :
- 1) Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online merupakan reformasi mendasar pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan secara modern sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), harus disukseskan pelaksanaannya;
 - 2) Guna meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kearsipan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa, agar diupayakan segera dibangun gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang *representative*;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan



program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Bandung, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. (Lihat Tabel 2.16)



Tabel 2.16
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kota Bandung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bandung				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bandung			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bandung	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bandung	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Tahun	17.728.449.604	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Tahun	17.728.449.604
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bandung	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Laporan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bandung	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Laporan	



RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG

5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	109.501.500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	109.501.500
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bandung	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bandung	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.571.455	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.571.455
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	858.491.795	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	858.491.795
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	92.114.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	92.114.600
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	343.166.580	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	343.166.580
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bandung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	159.562.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bandung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	159.562.500



RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG

12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	18.526.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	18.526.000
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	326.980.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	326.980.000
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandung	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandung	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	269.410.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	269.410.000
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.683.737.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.683.737.000
17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandung	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Bandung	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	



RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG

						Daerah		Pemerintahan Daerah		
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	585.486.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	585.486.000
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	1.287.355.944	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	1.287.355.944
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	115.077.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	115.077.000
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.175.249.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.175.249.500



RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG

22	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kota Bandung				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kota Bandung			
23	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Bandung	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Tepat Waktu	100%		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Bandung	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Tepat Waktu	100%	
24	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Bandung	Jumlah laporan Kegiatan penduduk non permanen dan penduduk rentan	12 Laporan	52.751.520	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Bandung	Jumlah laporan Kegiatan penduduk non permanen dan penduduk rentan	12 Laporan	52.751.520
25	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Bandung	Persentase Pencetakan KTP-EL dan Kartu Keluarga Tepat Waktu	100%	1.876.282.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Bandung	Persentase Pencetakan KTP-EL dan Kartu Keluarga Tepat Waktu	100%	1.876.282.000
26	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Bandung	Persentase Penerbitan Dokumen Pindah Keluar Tepat Waktu	100%	94.359.600	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Bandung	Persentase Penerbitan Dokumen Pindah Keluar Tepat Waktu	100%	94.359.600
27	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kota Bandung				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kota Bandung			



RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG

28	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Bandung	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Tepat Waktu	100%		Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Bandung	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Tepat Waktu	100%	
29	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Bandung	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kematian Tepat Waktu	100%	186.866.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Bandung	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kematian Tepat Waktu	100%	186.866.000
30	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Bandung	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Tepat Waktu	100%	282.030.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Bandung	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Tepat Waktu	100%	282.030.000
31	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Bandung	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Tepat Waktu	100%		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Bandung	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Tepat Waktu	100%	
32	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Kota Bandung	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan Tepat Waktu	100%	98.532.000	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Kota Bandung	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan Tepat Waktu	100%	98.532.000
33	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kota Bandung				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kota Bandung			



RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG

34	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Bandung	Jumlah Laporan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	12 Laporan		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Bandung	Jumlah Laporan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	12 Laporan	
35	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kota Bandung	Jumlah Laporan data yang tervalidasi	12 Laporan	144.207.000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kota Bandung	Jumlah Laporan data yang tervalidasi	12 Laporan	144.207.000
36	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Bandung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Laporan	119.099.900	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Bandung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Laporan	119.099.900
37	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Bandung	Jumlah Perencanaan dan Laporan Penyelenggaraan Adminduk	12 Laporan		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Bandung	Jumlah Perencanaan dan Laporan Penyelenggaraan Adminduk	12 Laporan	
38	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan	Kota Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Inovasi	12 Laporan	55.399.240	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan	Kota Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Inovasi	12 Laporan	55.399.240



RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG

39	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	
40	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Bandung	Jumlah Laporan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang Terimplementasi	4 Laporan	1.989.960.000	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Bandung	Jumlah Laporan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang Terimplementasi	4 Laporan	1.989.960.000
41	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Bandung	Jumlah Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Laporan	104.325.720	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Bandung	Jumlah Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Laporan	104.325.720
42	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kota Bandung	Jumlah Laporan Sosialisasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	369.504.790	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kota Bandung	Jumlah Laporan Sosialisasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	369.504.790
43	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Bandung	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis	1 Laporan		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Bandung	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis	1 Laporan	



RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG

44	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kota Bandung	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis	1 Laporan	219.255.640	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kota Bandung	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis	1 Laporan	219.255.640
----	--	--------------	---------------------------------	-----------	-------------	--	--------------	---------------------------------	-----------	-------------

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Disdukcapil sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Disdukcapil dalam hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait.

Musrenbang sebagai forum antar pelaku pembangunan menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah akan berfungsi menghasilkan kesepakatan antar pelaku mengenai RKPD yang dititik beratkan pada pembahasan mensinkronisasikan rencana kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD). Dan antar pemerintah daerah sebagai

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

a. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2023 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah, adapun arah kebijakan pembangunan untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional : Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, perlunya dukungan kebijakan daerah.

Arah Kebijakan :

- a. Perwujudan data dan dokumen kependudukan sebagai dasar dalam pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

- b. Mewujudkan integritas sistem administrasi kependudukan dengan berbagai stakeholder untuk meningkatkan cakupan akte lahir, akte mati dan akte cerai.
 - c. Terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien dan hasil tepat guna
 2. Prioritas Nasional 2 : Kabupaten/Kota Inovasi Pelayanan Kepada Masyarakat Peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota yang membahagiakan dengan Arah Kebijakan yaitu Meningkatkan Pelayanan yang membahagiakan melalui Inovasi
 3. Prioritas Nasional 3 : Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el yang optimal dengan Arah Kebijakan yaitu Terkoneksinya Database Kependudukan dengan OPD terkait
 4. Prioritas Nasional 4 : Penanganan Stunting Pemberian Dokumen Kependudukan bagi anak usia 0 s.d 24 Bulan dengan arah kebijakan yaitu Meningkatnya kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0 s.d 24 Bulan
 5. Prioritas Nasional 5 : Fasilitasi pemberian NIK bagi setiap penduduk dengan arah kebijakan yaitu Meningkatnya Kualitas Database Kependudukan
- b. Dalam melaksanakan pembangunan nasional ada hal-hal yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut:
 1. Penyediaan data kependudukan secara tersentral (online).
 2. Pemerintah daerah Provinsi dan Kab/Kota harus menyelenggarakan kegiatan yang mendukung suksesnya gerakan indonesia adminduk (GISA).
 3. Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang adminduk.



- b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan adminduk.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan adminduk melalui inovasi.
4. Fasilitasi dan koordinasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi dan Kab/Kota dengan OPD lain untuk pemanfaatan database kependudukan.
 5. Mendorong daerah untuk optimalisasi penerapan pelayanan berbasis digital.
 6. Peningkatan kualitas pelayanan dan penerbitan KTP-el melalui percepatan pelayanan sehari selesai.
 7. Jemput Bola di berbagai kantong pemukiman penduduk yang masih banyak belum melakukan perekaman termasuk membuka pelayanan perekamanKTPel di berbagai event tingkat nasional maupun regional.
 8. Perpanjangan waktu pelayanan/jam pelayanan di kantor setiap harinya minimal mulai jam 08.00 sd jam 18.00.
 9. Pelaksanaan pelayanan pada hari libur sabtu minggu dan hari libur nasional.
 10. Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan (MoU dan PKS).
 11. Konfigurasi jaringan dan database Kependudukan dalam rangka pemanfaatan data tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 12. Dinas Dukcapil Provinsi dan Kab/Kota memberikan elemen data kepada Lembaga Pengguna dengan cara melihat pada relevansi kebutuhan pemanfaatan data yang akan di akses oleh Lembaga Pengguna (tidak semua elemen data dapat

diberikan). Jumlah kebutuhan elemen data harus dimasukkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

13. Peningkatan kualitas pelayanan dan penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Anak Usia 0 s.d 24 Bulan.
14. Melakukan Kerjasama dengan OPD terkait untuk meningkatkan cakupan Akta Kelahiran.
15. Peningkatan kualitas pelayanan dan penerbitan NIK bagi penduduk.
16. Jemput Bola di berbagai kantong pemukiman penduduk yang masih banyak belum melakukan perekaman termasuk membuka pelayanan perekamanKTPel di berbagai event tingkat nasional maupun regional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja PD

1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 tahun kedepan (kapan).

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Kependudukan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Tujuan Dinas kependudukan yaitu, ***“TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”***

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan,

semesteran, Triwulan dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/Pemerintah Daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Kependudukan menetapkan sasaran untuk tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut

Tabel
Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandung Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Realisasi	Target	
			2022	2023	2024
1	TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	97,23%	96%	WBBM
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,02	86	A
		Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	97,23%	96,5%	81,95%
		Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	94,81%	75%	n/a

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan 2023 Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Bandung mengacu kepada pencapaian Visi Misi Kota Bandung sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, Dalam mewujudkan Visi Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berada dalam Bidang Pemerintahan Misi Dua yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih, dengan tujuan *Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien*. Dengan Sasaran *Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi*. Dalam pencapaian misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab Urusan wajib Kependudukan Dan Catatan Sipil, dengan Program Penataan Administrasi Kependudukan, Sasaran program Tertib Administrasi Kependudukan dengan indikator Program sebagai berikut :

- 1) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (Q1)
- 2) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (Q2)
- 3) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (Q3)

4) Cakupan Penerbitan Akta Kematian (Q4)

4.2 Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan.

Disamping berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2006/59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2021 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung merencanakan delapan program yang berkaitan dengan bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pendaftaran Penduduk
- c. Program Pencatatan Sipil
- d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Dari program tersebut diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya



- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pendaftaran Penduduk

- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk



- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan

C. Program Pencatatan Sipil

- a. Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
- b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
- b. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan
- c. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
- d. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan.

Dari uraian tersebut di atas secara rinci Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dapat diuraikan sebagai berikut :

Penjelasan ketidak sesuaian program dan kegiatan

Ketidak sesuaian rumusan program dan kegiatan dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/Kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya terjadi manakala ada kebijakan baru setelah rancangan awal RKPD disusun, baik kebijakan Nasional maupun kebijakan Daerah atau dalam keadaan porce majeure.

Tabel rencana program dan kegiatan (Lihat Tabel 3.1)



Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Bandung

Nama PD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Cata tan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bandung	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17.728.449.604	APBD		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19.501.294.564



RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bandung	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	109.501.500	APBD		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120.451.650
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bandung	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21.571.455	APBD		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23.728.601
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	858.491.795	APBD		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	944.340.975



RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	92.114.600	APBD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	101.326.060
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	343.166.580	APBD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	377.483.238
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bandung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	159.562.500	APBD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	175.518.750
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18.526.000	APBD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20.378.600



RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	326.980.000	APBD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	359.678.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandung	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	269.410.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	296.351.000



RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.683.737.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6.252.110.700
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandung	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	585.486.000	APBD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	644.034.600



RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.287.355.944	APBD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.416.091.538
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	115.077.000	APBD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	126.584.700
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.175.249.500	APBD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.492.774.450
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Kota Bandung					-



RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG

Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Tepat Waktu	Kota Bandung	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Tepat Waktu			Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Tepat Waktu	-
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan Kegiatan penduduk non permanen dan penduduk rentan	Kota Bandung	Jumlah laporan Kegiatan penduduk non permanen dan penduduk rentan	52.751.520	APBD	Jumlah laporan Kegiatan penduduk non permanen dan penduduk rentan	58.026.672
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pencetakan KTP-EL dan Kartu Keluarga Tepat Waktu	Kota Bandung	Persentase Pencetakan KTP-EL dan Kartu Keluarga Tepat Waktu	1.876.282.000	APBD	Persentase Pencetakan KTP-EL dan Kartu Keluarga Tepat Waktu	2.063.910.200
Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Pindah Keluar Tepat Waktu	Kota Bandung	Persentase Penerbitan Dokumen Pindah Keluar Tepat Waktu	94.359.600	APBD	Persentase Penerbitan Dokumen Pindah Keluar Tepat Waktu	103.795.560
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Kota Bandung					-



RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG

Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Tepat Waktu	Kota Bandung	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Tepat Waktu				Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Tepat Waktu	-
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kematian Tepat Waktu	Kota Bandung	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kematian Tepat Waktu	186.866.000	APBD		Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kematian Tepat Waktu	205.552.600
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Tepat Waktu	Kota Bandung	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Tepat Waktu	282.030.000	APBD		Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Tepat Waktu	310.233.000
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Tepat Waktu	Kota Bandung	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Tepat Waktu				Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Tepat Waktu	-
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan Tepat Waktu	Kota Bandung	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan Tepat Waktu	98.532.000	APBD		Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan Tepat Waktu	108.385.200



RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Kota Bandung						-
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Laporan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Bandung	Jumlah Laporan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				Jumlah Laporan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Laporan data yang tervalidasi	Kota Bandung	Jumlah Laporan data yang tervalidasi	144.207.000	APBD		Jumlah Laporan data yang tervalidasi	158.627.700
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Bandung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	119.099.900	APBD		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	131.009.890



RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG

Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Perencanaan dan Laporan Penyelenggaraan Adminduk	Kota Bandung	Jumlah Perencanaan dan Laporan Penyelenggaraan Adminduk			Jumlah Perencanaan dan Laporan Penyelenggaraan Adminduk	-
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan	Jumlah Laporan Fasilitasi Inovasi	Kota Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Inovasi	55.399.240	APBD	Jumlah Laporan Fasilitasi Inovasi	60.939.164
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-



RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG

Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang Terimplementasi	Kota Bandung	Jumlah Laporan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang Terimplementasi	1.989.960.000	APBD	Jumlah Laporan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang Terimplementasi	2.188.956.000
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Bandung	Jumlah Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan	104.325.720	APBD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan	114.758.292
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Administrasi Kependudukan	Kota Bandung	Jumlah Laporan Sosialisasi Administrasi Kependudukan	369.504.790	APBD	Jumlah Laporan Sosialisasi Administrasi Kependudukan	406.455.269
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis	Kota Bandung	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis			Jumlah Laporan Bimbingan Teknis	-



RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG

Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis	Kota Bandung	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis	219.255.640	APBD	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis	241.181.204
--	---------------------------------	--------------	---------------------------------	-------------	------	---------------------------------	-------------



BAB V PENUTUP

Rencana Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan yang memuat visi dan misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 serta merupakan kesinambungan dari Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Bandung.

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2024 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2024. Yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung 2024-2026. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kinerja (Renja) PD, Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan



kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2024 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya.;
2. Kepala dinas bersama seluruh aparatur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan evaluasi hasil Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara periodik yaitu per triwulan;
3. Program dan kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 menjadi pedoman dalam menyusun RKA PD;
4. Rencana Kerja Tahun 2024, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Bandung, Februari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



H. TATANG MUHTAR, S.Sos. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680602 198903 1 004